



## APAKAH TERDAPAT HUBUNGAN SIGNIFIKAN ANTARA PENYALURAN KUR DAN PERTUMBUHAN KREDIT UMKM PADA REGIONAL JAWA?

Ahmad Rifai,

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pajak, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

Muhammad Hafizh Ridha,

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anggaran dan Perbendaharaan, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

Ninggar Resti Cahyani,

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pajak, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

Alamat Korespondensi: [ahmad.rifai@kemenkeu.go.id]

### INFORMASI ARTIKEL

Diterima Pertama  
[15 11 2024]

Dinyatakan Diterima  
[25 11 2024]

#### KATA KUNCI:

Kredit Usaha Rakyat; Pembiayaan UMKM;  
Penyaluran KUR; UMKM; Pertumbuhan Kredit  
UMKM

#### KLASIFIKASI JEL:

[O10, O20]

### ABSTRAK

*People's Business Credit (KUR) is the main policy instrument in supporting Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Indonesia where MSMEs have an important impact on economic growth and reducing regional disparities. This study aims to investigate the relationship between KUR distribution and MSME credit growth in the Java region in Indonesia. This study was conducted by collecting secondary data, historical data on KUR distribution, MSME credit growth data, and regional economic data for the period 2015 to 2022. Regression analysis and other statistical techniques were used to identify the relationship. The results of this study indicate that KUR distribution is not related to MSME credit growth in the Java region, while commercial credit is positively related to MSME credit growth in the Java region. The results of this study have significant policy implications where the government needs to emphasize a region-focused approach in designing KUR distribution policies to support sustainable MSME credit growth in Indonesia.*

Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan instrumen kebijakan utama dalam mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia dimana UMKM memiliki dampak penting terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kesenjangan regional. Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi hubungan antara penyaluran KUR dengan pertumbuhan kredit UMKM pada regional Jawa di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder, data historis penyaluran KUR, data pertumbuhan kredit UMKM, dan data ekonomi wilayah periode 2015 s.d. 2022. Analisis regresi dan teknik statistik lainnya digunakan untuk mengidentifikasi hubungan tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyaluran KUR tidak berhubungan dengan pertumbuhan kredit UMKM di regional Jawa, sedangkan kredit komersial justru secara positif berhubungan dengan pertumbuhan kredit UMKM di regional Jawa. Hasil penelitian ini memiliki implikasi kebijakan yang signifikan dimana pemerintah perlu menggarisbawahi pendekatan yang berfokus pada wilayah dalam perancangan kebijakan penyaluran KUR untuk mendukung pertumbuhan kredit UMKM yang berkelanjutan di Indonesia.

## 1. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi menjadi salah satu tolak ukur berhasil atau tidaknya pembangunan di suatu negara karena kontribusinya terhadap pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam pembangunan tersebut, perlu adanya peran masyarakat, salah satunya melalui Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). UMKM tersebut dapat dilakukan oleh orang pribadi maupun badan usaha yang merupakan usaha produktif. UMKM menjadi sangat penting dan vital karena ketangguhannya dalam menghadapi kondisi krisis ekonomi seperti yang terjadi di Indonesia pada 1998 silam (Purnaningrum et al., 2021), bahkan cenderung bertambah jumlahnya (Artini, 2019). Kadin (2024) menjelaskan bahwa pengkategorian UMKM didasarkan pada besarnya modal usaha saat pendirian dengan tidak memperhitungkan biaya aset seperti tanah dan bangunan. UMKM dengan kategori mikro memiliki modal kegiatan usaha paling banyak Rp1 miliar, sedangkan modal berkisar antara Rp1 miliar s.d. Rp5 miliar merupakan kategori kecil. Sementara itu, UMKM dengan modal di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar, dikategorikan ke dalam usaha kelas menengah, sedangkan usaha dengan modal usaha lebih besar dari Rp10 miliar dimasukkan menjadi kelas usaha besar.

UMKM memiliki andil cukup besar dan peran yang sangat penting dalam pergerakan perekonomian yaitu mampu membuka peluang lapangan kerja yang melimpah untuk masyarakat Indonesia (Darnis & Azdy, 2019). Selain itu, UMKM mampu memberikan nilai tambah karena penggunaan bahan baku lokal yang tentunya sangat bermanfaat bagi masyarakat setempat (Rohani, 2018). Karena UMKM bersifat lokal, tentunya dapat memberikan sumbangan pada peningkatan perekonomian daerah yang pada akhirnya akan berkontribusi pada perekonomian secara nasional (Elliyana et al., 2020). Bagi masyarakat dengan penghasilan rendah, UMKM ini sangat membantu meningkatkan pendapatannya (Haqiqi et al., 2020). Lebih lanjut lagi, Kadin (2024) mengungkapkan bahwa 99% dari total unit usaha disumbang dari peran UMKM. Kementerian Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (KemenkopUKM) menjelaskan bahwa pada tahun 2018, kontribusi UMKM mampu mencetak angka 61,07 % dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia atau setara dengan Rp9.062.581,3 miliar. Selanjutnya, pada tahun 2019 kontribusi ini mencapai 60,51% yang setara dengan Rp9.580.762,7 miliar. Berdasarkan data yang dirilis oleh BKPM (2020) dalam Lisnawati (2023), PDB disumbang oleh UMKM sebesar 61,97% atau sekitar Rp8.500 triliun. Sementara itu, Kadin (2024) mengungkapkan bahwa pada tahun 2023, UMKM berkontribusi sebesar 61% atau setara dengan Rp9,580 triliun terhadap PDB.

Sebagian besar UMKM yang ada di Indonesia merupakan aktivitas yang berbasis usaha rumah tangga, yang tentunya mampu mempekerjakan banyak masyarakat. Data tahun 2018 yang disajikan

KemenkopUKM menampilkan sebanyak 64.194.057 jumlah UMKM yang ada di Indonesia dan mampu menyerap sebanyak 116.978.631 tenaga kerja. Sementara itu, tercatat sebanyak 65.465.497 UMKM dengan 119.562.843 tenaga kerja yang terserap. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat kenaikan jumlah UMKM sebesar 1,98% dan daya serap tenaga kerja sebesar 2,21%. Selanjutnya, data dari BKPM (2020) dalam Lisnawati (2023) menyatakan bahwa dengan adanya UMKM, tenaga kerja terserap sebanyak 97%, sedangkan Kadin (2024) mengungkapkan bahwa pengusaha yang bergelut di bidang UMKM pada tahun 2023 ialah sekitar 66 juta dengan kemampuan serap tenaga kerja sebanyak kurang lebih 117 juta. Hal ini membuktikan bahwa UMKM memberikan dampak dan turut memberdayakan masyarakat sehingga mampu untuk membantu mengurangi jumlah pengangguran.

Aristanto et al. (2022) menjelaskan bahwa dibalik potensi dan kontribusinya yang sangat besar bagi perkenomian, UMKM menghadapi beberapa kendala dan hambatan dalam menjalankan usahanya. Keterbatasan dalam mengakses layanan keuangan formal menjadi tantangan besar bagi pelaku UMKM (Aqida & Fitria, 2019; Ningsih et al., 2023; Prabowo et al., 2020). Selain itu, ketersediaan lembaga keuangan formal yang secara khusus melayani kebutuhan pendanaan bagi UMKM ini masih terbatas (Ningsih et al., 2023; Riffianto & Suryani, 2016; Wahyudiati & Isroah, 2018). Hal ini disebabkan karena penyedia dana pinjaman seperti perbankan maupun lembaga non bank lebih memprioritaskan usaha yang telah mapan atau layak (Sanistasya et al., 2018), termasuk tingginya biaya layanan keuangan (Ningsih et al., 2023), tingginya bunga yang ditawarkan serta rangkaian proses peminjaman yang tidak mudah (Latifah & Lubis, 2020; Santoso, 2020), serta adanya syarat jaminan dalam mengajukan pinjaman. Ketat (Aqida & Fitria, 2019; Sanistasya et al., 2018). Selain itu, keterbatasan UMKM lainnya ialah terkait literasi pengelolaan keuangan dan pengelolaan bisnis (Aribawa, 2016; Ningsih et al., 2023; Prakoso, 2020). Kendala-kendala terkait literasi keuangan membuat mereka tidak mampu mengakses layanan keuangan tertentu, seperti garis kredit dan investasi (Aqida & Fitria, 2019). Tantangan dan kendala ini menghambat pertumbuhan dan ekspansi bisnis-bisnis UMKM, membuat proses adopsi terhadap perkembangan teknologi yang baru dan lebih canggih terbatas sehingga untuk bersaing di pasar yang lebih efektif juga terhambat (Hervé et al., 2020; Somadi, 2020). Selain itu, pendanaan UMKM hanya mengandalkan sumber informal yang sebagian besar biayanya lebih mahal dan tidak memadai (Octavia et al., 2020).

Mengingat pentingnya peran UMKM sebagai *critical engine* untuk kemajuan perekonomian Indonesia, pemerintah terus berusaha mewadahi dan mendukung kemajuan UMKM. Pada tahun 2020-2021 di awal masa pandemi Covid-19, banyak UMKM yang terpuruk. Survei dari United Nations Development Programme (UNDP) dan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM

UI) terkait kondisi UMKM saat Covid-19 dimana hasilnya ialah sebanyak 48% UMKM memiliki masalah bahan baku, 77% lainnya menyebutkan bahwa pendapatan mereka berkurang bahkan hilang, 88% tidak ada permintaan produk, dan 97% UMKM nilai asetnya menghilang (Lisnawati, 2023).

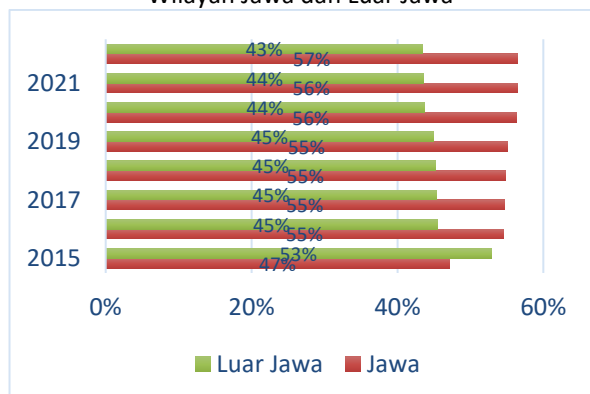
Menjawab tantangan dan kendala tersebut dan sebagai upaya perluasan akses permodalan dan peningkatan inklusi keuangan bagi UMKM, Pemerintah menerapkan kebijakan yaitu dengan membuat sebuah program pendanaan usaha UMKM yang bernama Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 (Aristanto, 2019). KUR merupakan salah satu program pemerintah yang membantu UMKM mendapatkan bantuan akses pendanaan. KUR disalurkan dan bekerjasama dengan lembaga keuangan yang telah ditunjuk oleh pemerintah dengan pola penjaminan yang telah disepakati. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 189/PMK.05/2010, bantuan akses pendanaan KUR diberikan kepada pelaku UMKM yang produktif serta layak atau yang biasanya disebut dengan *feasible*, tetapi mereka memiliki keterbatasan untuk memenuhi persyaratan yang diberikan oleh perbankan atau yang biasa disebut dengan *bankable*.

Suksesnya pelaksanaan program KUR harus didukung oleh beberapa pihak seperti:

1. Pemerintah yang memiliki peran pengambil kebijakan serta menyokong pemberian KUR dan penjaminan kredit;
2. Lembaga penjaminan yang memiliki peran sebagai penjamin kredit dan pembiayaan; dan
3. Bank penyalur yang telah ditunjuk oleh Pemerintah.

Sesuai dengan data dari Badan Pusat Statistik, proporsi penyaluran KUR di Indonesia berdasarkan lokasi penyalurannya adalah sebagaimana Gambar 1.

Gambar 1 Proporsi Penyaluran KUR di Indonesia  
Wilayah Jawa dan Luar Jawa



Sumber: Diolah oleh penulis dari Aplikasi SIKP (2024)

Gambar 1 menjelaskan bahwa proporsi penyaluran KUR di Indonesia masih didominasi oleh UMKM di regional Pulau Jawa. Pernyataan ini juga dapat dilihat dari data dari Kadin (2024) dimana UMKM di Pulau Jawa berkontribusi sebesar 54,11% terhadap seluruh nilai tambah UMKM pada tahun 2023. Lebih lanjut, 5 Provinsi dengan kontribusi UMKM terbesar

pada tahun 2023 berturut-turut adalah Jawa Barat (16,92%), Jawa Timur (14,53%), Jawa Tengah (11,00%), DKI Jakarta (6,16%), dan Sumatera Utara (5,01%). Hal ini menunjukkan bahwa UMKM di Pulau Jawa mencatatkan kinerja luar biasa dan pertumbuhan positif selama tahun 2023. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemendik Perekonomian) menyajikan data bahwa pada tahun 2018, berdasarkan sebaran wilayah penyaluran KUR, masih didominasi Pulau Jawa memiliki jumlah penyaluran sebesar 56,1%, posisi selanjutnya ialah Sumatera 19,6% dan Sulawesi 9,4%. Provinsi Jawa Tengah memiliki proporsi penyaluran KUR sebesar Rp5,9 Triliun (18,6% dari total penyaluran KUR) dan menjadi provinsi dengan penyaluran KUR tertinggi, diikuti dengan Jawa Timur sebesar Rp5,3 Triliun (16,4% dari total penyaluran KUR), dan Jawa Barat sebesar Rp4 Triliun (12,5% dari total penyaluran KUR). Jika melihat jumlah tersebut, maka bisa diketahui bahwa sesuai dengan populasi UMKM per wilayah di Indonesia.

Kontan (2024) menyatakan bahwa hingga Juli 2024, Pemerintah telah menyalurkan KUR sekitar Rp166,19 triliun atau sekitar 55,4% dari target Rp300 triliun. Sebagian besar jumlah penyaluran KUR per provinsi terbanyak sampai dengan akhir Juli 2024 ialah Provinsi Jawa Tengah dengan realisasi sebesar Rp28,32 triliun, Jawa Timur Rp26,96 triliun, dan Jawa barat Rp16,14 triliun. Total penyaluran KUR di wilayah Jawa mencapai Rp82,57 triliun dan memiliki kontribusi sebesar 49,68% dari penyaluran KUR nasional. Sementara itu, realisasi KUR di luar wilayah Jawa adalah Provinsi Sulawesi Selatan sebesar Rp10,03 triliun, Sumatera utara sebesar Rp8,92 triliun, dan Bali sebesar Rp6,75 triliun.

Pertumbuhan kredit UMKM merupakan topik penting dalam pengembangan ekonomi, terutama di Indonesia. Kredit UMKM memainkan peran signifikan dalam meningkatkan modal, pendapatan, dan profitabilitas UMKM, yang tujuan akhirnya mampu berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini diperkuat dengan Peraturan Bank Indonesia nomor 14/22/PBI/2012 yang memberikan kejelasan batas akses kredit atau pembiayaan dari perbankan kepada pelaku UMKM. Peraturan tersebut memberikan keterangan terkait kewajiban Bank Umum untuk memberikan kredit atau pembiayaan UMKM paling rendah 20% untuk tahun 2018 s.d. 2022, bahkan meningkat menjadi 30% pada dua tahun terakhir. Kredit tersebut dihitung berdasarkan rasio kredit atau pembiayaan UMKM terhadap total kredit atau pembiayaan. Target 30% ialah keseluruhan dari total dari kredit nasional, yang penyalurannya melalui perbankan maupun lembaga-lembaga keuangan nonbank lainnya.

Pemerintah Indonesia telah melaksanakan berbagai program pemberdayaan UMKM yang berfokus pada akses pembiayaan, baik itu yang bersumber dana dari Bank maupun dari pemerintah sendiri, dengan berbagai macam skema, mulai dari subsidi bunga, penjaminan, hingga *risk sharing*, namun dari sekian

banyak kredit program, banyak program yang dihentikan karena macet dan dinilai tidak tepat sasaran oleh aparat pemeriksa eksternal (BPK).

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa penyaluran KUR memiliki dampak yang baik serta positif terhadap pertumbuhan kredit UMKM yang meliputi peningkatan pendapatan UMKM (Adju et al., 2023; Syam & Musfira, 2021; Waryanto, 2020), pengembangan usaha dan kesejahteraan sosial (Candratrilaksana et al., 2020; Purnama et al., 2022), pertumbuhan modal dan keuntungan (Ati et al., 2022), serta pertumbuhan UMKM (Mokalu et al., 2018).

Selain KUR, lembaga bank, baik BUMN maupun swasta di Indonesia dapat memberikan pinjaman/kredit komersial kepada UMKM yang tetap memperhatikan suku bunga, jangka waktu, dan prosedur pengajuan pinjaman sesuai dengan ketentuan yang berlaku dimana diatur dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Kredit komersial UMKM diberikan oleh lembaga bank tanpa adanya subsidi dari pemerintah serta persyaratannya diatur oleh masing-masing penyalur kredit sesuai dengan target dan aturan yang telah mereka tetapkan.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, posisi kredit UMKM pada bank umum konvensional dan syariah dari tahun 2017 s.d. 2023 adalah sebagaimana Tabel 1.

Tabel 1 Posisi Kredit UMKM pada Bank Umum Tahun 2017 s.d. 2023 (dalam miliar rupiah)

| Tahun | Posisi Kredit | Skala Usaha |         |          |
|-------|---------------|-------------|---------|----------|
|       |               | Mikro       | Kecil   | Menengah |
| 2017  | 882.982       | 207.682     | 269.162 | 406.138  |
| 2018  | 969.972       | 236.868     | 298.065 | 435.039  |
| 2019  | 1.107.240     | 283.518     | 343.245 | 480.477  |
| 2020  | 1.088.333     | 247.142     | 352.923 | 488.268  |
| 2021  | 1.221.015     | 389.871     | 459.541 | 371.603  |
| 2022  | 1.348.813     | 532.698     | 466.542 | 349.573  |
| 2023  | 1.457.132     | 662.293     | 460.773 | 334.066  |

Sumber: OJK dalam BPS (2024)

Tabel 1 menjelaskan bahwa dari tahun 2017 s.d. 2023 jumlah kredit yang disalurkan oleh Bank Umum kepada pelaku UMKM terus meningkat. Dari tahun 2017 s.d. 2020, UMKM dengan skala usaha menengah mendominasi posisi kredit, sedangkan skala usaha kecil mendominasi di tahun 2021. Dua tahun terakhir, 2022-2023, pelaku usaha UMKM dengan skala usaha mikro menduduki urutan pertama posisi kredit pada bank umum. Dalam tabel tersebut total kredit UMKM mengalami peningkatan kredit untuk skala mikro dan kecil, tetapi fluktuatif untuk skala menengah dimana prediksi posisi kredit UMKM skala menengah untuk 3 tahun ke depan (2024-2026) akan memiliki tren penurunan yang lebih tajam (Teruna & Ardiansyah, 2024).

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, penulis tertarik untuk menganalisis apakah terdapat hubungan antara penyaluran KUR dengan pertumbuhan kredit UMKM di Pulau Jawa. Meskipun Pulau Jawa bukan wilayah yang paling luas di Indonesia, yaitu hanya sekitar 7% dari luas Indonesia, tetapi Pulau Jawa

memiliki populasi yang besar, yaitu mencakup sekitar 60% dari populasi Indonesia. Padatnya penduduk di Pulau Jawa menjadikannya pasar konsumen terbesar di Indonesia sehingga semakin besar pula pertumbuhan pelaku UMKM. Selain itu, berbagai infrastruktur sudah tersedia di Pulau Jawa seperti fasilitas jalan tol yang semakin terhubung, rel kereta api yang menyambung Pulau Jawa dari barat ke timur, bandara dan pelabuhan yang hampir ada di setiap kota, akses pendidikan yang mudah dan berkualitas, serta gedung-gedung bertingkat dengan listrik dan jaringan komunikasi yang sudah stabil membuat Pulau Jawa menjadi pusat perekonomian terbesar di Indonesia. Seiring dengan perubahan dinamika ekonomi nasional, pemahaman lebih lanjut mengenai hubungan antara penyaluran KUR dan pertumbuhan kredit UMKM di wilayah ini menjadi semakin penting. Peneliti tidak menemukan penelitian yang secara khusus mengkaji hubungan atau pengaruh KUR dan pertumbuhan kredit UMKM di Pulau Jawa secara keseluruhan. Hamdani & Farmiati (2021) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa penyaluran kredit investasi oleh bank terhadap UMKM di Aceh memiliki hasil yang positif bagi pertumbuhan keuangan usaha UMKM. Faisal & Sejati (2023) mengungkapkan bahwa Bank Syariah Indonesia memiliki peran dalam mendorong pengembangan UMKM melalui penyediaan pembiayaan modal awal, dukungan moneter tambahan, dan fasilitasi pembiayaan UMKM yang memiliki tujuan untuk memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi masyarakat dan meningkatkan kinerja ekonomi secara keseluruhan.

## 2. KERANGKA TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

### 2.1. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah, disebutkan bahwa UMKM ialah bisnis individu, rumah tangga, ataupun badan usaha berskala kecil yang memiliki tujuan menumbuhkan dan melebarkan usahanya yang mampu berkontribusi untuk peningkatan perekonomian nasional ekonomi yang berkeadilan. Sementara itu, definisi lebih rinci terkait Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah tercantum pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

### 2.2. Kredit UMKM

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.03/2018 Tahun 2018 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar Bagi Bank Umum, kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan perjanjian atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Singkatnya, kredit merupakan pinjaman berupa uang yang diberikan oleh perbankan maupun lembaga non-bank dengan perjanjian Menurut Kasmir pada

tahun 2013 (Ratna Sari, 2016). Tujuan utama pemberian kredit adalah mencari keuntungan, membantu usaha nasabah, dan membantu pemerintah.

Dari beberapa penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa Kredit UMKM adalah pemberian bantuan modal usaha yang diberikan oleh bank maupun lembaga non-bank dalam rangka memenuhi modal kerjanya sehingga usaha yang dijalankan oleh UMKM bisa berkembang. Jika UMKM berkembang, maka kontribusi UMKM dalam perekonomian semakin meningkat serta harapannya dapat mengurangi pengangguran yang ada di Indonesia dengan lapangan kerja yang terbuka. Beberapa jenis kredit UMKM yang bisa menjadi pilihan pelaku usaha ialah kredit komersil yang diberikan oleh perbankan termasuk kredit modal kerja dan investasi, Kredit Usaha Rakyat (KUR) dimana skema ini memiliki campur tangan pemerintah, kredit melalui koperasi, dan lain sebagainya.

### 2.3. Kredit Komersial UMKM

Secara singkat kredit komersial merupakan kredit yang diberikan oleh perbankan untuk membiayai usaha yang sedang dijalankan. Beberapa kredit komersial yang disediakan perbankan diantaranya ialah Kredit Modal Kerja, Kredit Investasi, dan Kredit Pembelian Properti Komersial. Menurut Barus & Lu (2013), kredit yang bisa diberikan kepada UMKM untuk menjalankan usahanya ialah:

1. Kredit Modal Kerja (KMK), merupakan kredit yang diberikan untuk pemenuhan kegiatan operasional usaha sehari-hari.
2. Kredit Investasi, merupakan kredit yang digunakan oleh usaha/ badan usaha yang digunakan untuk pembelian barang modal ataupun aset lainnya untuk keperluan peningkatan usahanya dalam jangka menengah maupun dalam jangka panjang
3. Kredit Konsumsi, merupakan salah satu kredit yang diberikan kepada orang perseorangan, pedagang, badan usaha, karyawan, dan profesi lainnya untuk keperluan konsumsi. Menurut pemerintah, kredit konsumsi memiliki kebijakan kredit yang lebih sederhana, sehingga memudahkan bagi para pemilik UMKM.

Kredit komersial UMKM bisa diberikan oleh lembaga bank, baik bank yang berstatus BUMN maupun bank swasta tanpa adanya subsidi dari pemerintah, persyaratan kredit komersial UMKM ini diatur oleh masing-masing penyalur kredit sesuai dengan target dan aturan yang telah mereka tetapkan. Kredit komersial UMKM ini bisa digunakan untuk pengembangan usaha termasuk peningkatan produksi, menambah modal untuk operasional usaha, sebagai sumber utang usaha jangka pendek maupun utang usaha jangka panjang.

### 2.4. Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Menurut Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan program yang digalakkan oleh pemerintah untuk memberikan akses pembiayaan kepada Usaha Mikro,

Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan bekerja sama melalui bank yang telah ditunjuk dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Program ini ditujukan agar UMKM memiliki kemampuan modal dalam mengembangkan usahanya, sehingga nantinya mampu berkontribusi dalam peningkatan perekonomian nasional. KUR mulai digalakkan pada tanggal 5 November 2007. Pendanaan yang dimaksudkan dalam program KUR meliputi pendanaan untuk modal kerja maupun investasi baik untuk usaha perseorangan maupun kelompok yang telah ditetapkan Pemerintah. KUR menyasar usaha yang produktif dan layak tetapi belum bisa menjangkau pendanaan dari bank. Menurut Syahrir et al. (2016), usaha layak merupakan usaha yang bisa mendatangkan keuntungan sehingga nantinya mampu membayar hutang beserta bunga kredit dalam jangka waktu yang telah disepakati kedua belah pihak. Sedangkan usaha yang belum *bankable* merupakan usaha yang belum mampu memenuhi syarat-syarat kredit yang ditetapkan untuk mendapatkan bantuan pembiayaan, contohnya antara lain belum mampu menyediakan jaminan kredit.

Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2023 Pasal 1, Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup. UMKM yang mengajukan KUR wajib memiliki umur usaha minimal 6 bulan baik di bidang perdagangan, pertanian, perikanan, maupun jasa lainnya mengingat KUR ini bertujuan untuk memberikan bantuan modal kepada UMKM yang baru merintis usahanya.

Walaupun KUR dan Kredit Komersial UMKM (KUM) merupakan jenis kredit yang ditujukan bagi UMKM, keduanya memiliki beberapa perbedaan. Alma Meidhita (2023) merangkum perbedaan tersebut dari Presiden Nomor 6 Tahun 2007 dan Peraturan Bank Indonesia nomor 14/ 22 /PBI/2012 sebagaimana Tabel 2.

Tabel 2 Perbedaan KUR dan KUM

| Keterangan          | KUR                                                          | KUM                                                                  |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Lembaga penjamin    | Pemerintah melalui PT Askrindo dan PT Jamkrindo              | Tidak ada campur tangan pemerintah dalam penyaluran dan mekanismenya |
| Bank pelaksana      | Bank BUMN yang telah ditunjuk pemerintah                     | Semua bank yang melaksanakan KUM                                     |
| Persyaratan agunan  | Tidak menyerahkan syarat penyertaan jaminan tergantung limit | Wajib menyertakan                                                    |
| Limit plafon kredit | •KUR linkage (bunga 14% per tahun; limit plafon kredit       | Batas atas Rp5 juta – Rp100 juta per tahun dengan                    |

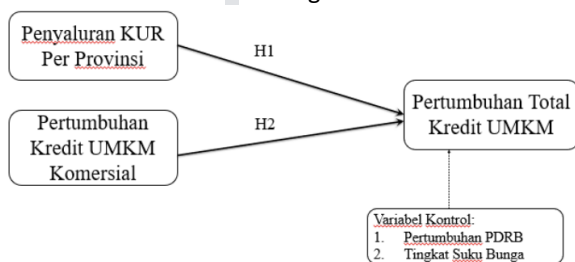
|                       |                                                                                                                                                                                 |                                      |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|                       | maksimal Rp2 miliar)<br>•KUR Ritel (bunga 13% per tahun; limit plafon kredit Rp20 juta - Rp50 juta)<br>•KUR Mikro (bunga 22% per tahun; limit plafon kredit maksimal Rp20 juta) | bunga 12%-24% per tahun              |
| Persyaratan pengajuan | Usaha telah berjalan minimal 6 bulan                                                                                                                                            | Usaha telah berjalan minimal 2 tahun |

Sumber: Alma Meidhita (2023)

## 2.5. Kerangka Penelitian dan Hipotesis

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan penyaluran KUR terhadap total kredit bagi UMKM, khususnya di regional Jawa. Program yang semakin bervariasi diharapkan dapat meningkatkan jumlah pembiayaan bagi debitur. Program KUR diharapkan dapat menjadi pilihan dengan segmen yang berbeda dengan kredit UMKM.

Gambar 2 Kerangka Penelitian



Sumber: Diolah penulis (2024)

Berdasarkan kerangka penelitian tersebut, Hipotesis penelitian ini adalah pertumbuhan kredit KUR berdampak positif pada pertumbuhan kredit UMKM. Kerangka penelitian sebagaimana Gambar 2 dengan rincian sebagai berikut:

### Penyaluran KUR dan Pertumbuhan Total Kredit UMKM

Kredit UMKM memainkan peran signifikan dalam meningkatkan modal, pendapatan, dan profitabilitas UMKM, yang tujuan utamanya ialah memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan adanya KUR, pemerintah berharap mampu meningkatkan daya saing serta mensejahterakan UMKM. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa penyaluran KUR memiliki dampak positif terhadap pertumbuhan kredit UMKM yang diukur dengan *proxy* yang berbeda, seperti profitabilitas UMKM (Hutabarat et al., 2023), pendapatan nasabah UMKM (Putri, 2022) atau kinerja UMKM (Suryani & Rita, 2023). Pada penelitian tersebut, hasil yang diperoleh adalah penyaluran KUR berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kinerja UMKM, yang diukur melalui profitabilitas atau pendapatan nasabah UMKM. Fokus penelitian ini

adalah menguji penyaluran KUR terhadap pertumbuhan total kredit UMKM, sehingga penelitian ini memiliki hipotesis pertama yaitu:

**H1: Terdapat hubungan positif antara Penyaluran KUR di regional Jawa dengan pertumbuhan total kredit UMKM**

### Pertumbuhan Kredit UMKM Komersial dan Pertumbuhan Total Kredit UMKM

Hipotesis kedua ini akan menguji pengaruh pertumbuhan kredit komersial yang lebih tinggi terhadap pertumbuhan total kredit UMKM, dibandingkan pengaruh dari kredit KUR. Kondisi ini diakibatkan karena proporsi kredit KUR yang tidak sebesar kredit komersial. KUR hanya disalurkan oleh bank BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah dengan regulasi dari pemerintah, sedangkan kredit komersial dapat diterbitkan oleh semua lembaga keuangan baik bank bank maupun non-perbankan sebagai produk mereka. Porsi kredit KUR terhadap kredit UMKM hingga tahun 2023 sekitar 30% dari total kredit UMKM, dengan meningkatnya kredit komersial tentu dampak pada pertumbuhan total kredit UMKM akan lebih berpengaruh apabila dibandingkan kredit KUR. Bank Indonesia telah berupaya untuk meningkatkan kredit UMKM dengan memberikan insentif sekitar 0,2% s.d. 0,5% terhadap kewajiban Giro Wajib Minimum (GWM) apabila bank menyalurkan kredit kepada sektor prioritas, pencapaian rasio pembiayaan inklusif makroprudensial dan/atau pembiayaan lain yang ditetapkan Bank Indonesia, tetapi efektivitas dari insentif ini masih perlu dikaji lebih lanjut. Prabowo et al. (2020) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa adanya perbedaan penyerapan kredit sebelum (periode 2013-2014) dan sesudah (2016-2017) Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/12/PBI/2015 diundangkan dimana penyerapan kredit mengalami peningkatan pasca diberlakukannya Peraturan tersebut. Berdasarkan penjelasan ini maka disusun hipotesis sebagai berikut.

**H2: Terdapat hubungan positif antara pertumbuhan kredit UMKM komersial dengan pertumbuhan total kredit UMKM**

## 3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian *Quantitative method* yang secara sistematis meneliti variabel tertentu dan fenomena serta kausalitas hubungan antar variabel. Proses pengukuran merupakan bagian penting dalam penelitian kuantitatif karena, karena dapat memberikan hubungan yang mendasar antara pengamat empiris dan ekspresi matematis dari hubungan-hubungan kuantitatif (Purboadji et al., 2022).

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bukan diusahakan sendiri dalam pengumpulannya oleh peneliti. Sumber data sekunder berasal dari Statistik Perbankan Indonesia OJK, Aplikasi SIKP, Badan Pusat Statistik dan Bank Indonesia. Data yang digunakan adalah data panel per Provinsi 2015-2022. Provinsi yang menjadi sampel penelitian merupakan provinsi di wilayah Jawa, yaitu

Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, peneliti menggunakan pertumbuhan total kredit UMKM sebagai variabel dependen. Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi oleh adanya variabel bebas/independen. Selanjutnya, variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen. Variabel independen yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) per Provinsi dan Pertumbuhan Kredit Komersial UMKM, sementara variabel kontrol berupa Pertumbuhan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRBG) dan Tingkat Suku Bunga (INT). PDRBG dipilih menjadi variabel kontrol dengan harapan bahwa apabila PDRB tumbuh, maka daya beli akan naik, kemudian diikuti dengan pertumbuhan produk UMKM dan kebutuhan pembiayaan pada UMKM. Selanjutnya, tingkat suku bunga juga diharapkan dapat menjadi faktor penting dalam menentukan strategi pembiayaan yang dilakukan oleh UMKM. Gambaran operasionalisasi variabel dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3 Operasionalisasi Variabel Penelitian

| Variabel                                    | Definisi                                                                                                                                                                                    | Ukuran                                                            |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Pertumbuhan Total Kredit UMKM (UMKM)        | Persentase pertumbuhan nilai <i>outstanding</i> kredit UMKM dibandingkan tahun lalu pada provinsi tertentu (sumber: data Statistik Perbankan Indonesia dari OJK)                            | $UMKM_{it} = (UMKM_{it} - UMKM_{it-1}) : UMKM_{it-1}$             |
| Penyaluran KUR per Provinsi (KUR)           | Nilai Penyaluran KUR pada provinsi dan tahun tertentu dalam nilai satuan triliun                                                                                                            | Logaritma Natural dari Penyaluran KUR per Provinsi                |
| Pertumbuhan Kredit UMKM Komersial (UMKMKOM) | Persentase pertumbuhan nilai <i>outstanding</i> kredit UMKM Komersial dibandingkan tahun lalu pada provinsi tertentu (sumber data Statistik Perbankan Indonesia dari OJK dan Aplikasi SIKP) | $UMKMKOM_{it} = (UMKMKOM_{it} - UMKMKOM_{it-1}) : UMKMKOM_{it-1}$ |
| Pertumbuhan PDRB (PDRBG)                    | Nilai pertumbuhan Pendapatan Domestik Regional Bruto pada provinsi dan tahun tertentu menggunakan harga konstan (sumber data BPS)                                                           | -                                                                 |
| Tingkat Suku Bunga (INT)                    | Tingkat Suku Bunga Tiap Tahun                                                                                                                                                               | -                                                                 |

Sumber: Diolah Penulis (2024)

### Objek Penelitian

Objek penelitian untuk seluruh hipotesis adalah penyaluran KUR, pertumbuhan total kredit UMKM, serta pertumbuhan kredit komersial UMKM di seluruh provinsi di Pulau Jawa di Indonesia dengan rentang waktu 2015 s.d. 2022. Pemilihan rentang waktu tersebut berdasarkan ketersediaan data untuk seluruh provinsi pada regional Jawa. Oleh karena itu, jumlah sampel dalam penelitian ini ditetapkan sebanyak 48 observasi (6 provinsi x 8 tahun).

### Metode Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan regresi linier pada data panel yang telah diolah. Selanjutnya, penulis menggunakan aplikasi STATA sebagai alat untuk membantu mengamati hasil penelitian yang telah dilakukan. Metode yang dapat digunakan dalam menganalisis regresi data panel yaitu *Pooled Least Square* (PLS)/*Common Effect Model* (CEM); *Fixed Effect Model* (FEM); atau *Random Effect Model* (REM).

Kemudian, langkah-langkah yang harus dilakukan dalam upaya memperoleh model yang tepat dalam regresi panel yaitu:

1. Uji Chow berdasarkan hasil estimasi FEM, hal ini digunakan untuk dibandingkan dengan hasil estimasi CEM. Apabila terbukti ada efek individu maka dilanjutkan dengan melakukan uji Hausman untuk menentukan antara FEM dan REM,
2. Apabila pada Uji Hausman diperoleh bahwa metode yang sesuai adalah model FEM maka dilakukan uji Lagrange Multiplier (LM) untuk mengetahui apakah pada model FEM terdapat heteroskedastisitas,
3. Selanjutnya, jika dari hasil uji LM tersebut terdapat heteroskedastisitas maka model FEM akan diestimasi dengan *weighted: Cross-section weight*.

Setelah diperoleh metode yang digunakan, akan dilakukan pengujian hipotesis dengan sebelumnya dilakukan uji asumsi klasik, berupa:

1. Uji Normalitas untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual terdistribusi secara normal.
2. Uji Heteroskedastisitas untuk mengetahui apakah terjadi penyimpangan model karena gangguan varian yang berbeda antar observasi satu ke observasi lain, apakah variasi dari eror bersifat tetap/konstan (homoskedastis) atau berubah-ubah (heteroskedastis); dan,
3. Uji Multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui apakah antar variabel independen dalam persamaan regresi tersebut tidak saling berkorelasi, sehingga nilai *standard error* dari koefisien menjadi tidak valid dan hasil uji signifikansi koefisien dengan Uji T tidak valid.

Selanjutnya dilakukan pengujian hipotesis melalui pengujian secara parsial (uji t), pengujian secara simultan (uji f), dan pengujian koefisien determinasi ( $R^2$ ). Berikut ini merupakan model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini.

$$UMKM_{it} = \alpha + \beta_1 KUR_{it} + \beta_2 UMKMKOM_{it} + \beta_3 PDRBG_{it} + \beta_4 INT_{it} + \varepsilon$$

#### 4. HASIL PENELITIAN

Statistik deskriptif menyajikan gambaran secara keseluruhan variabel berupa jumlah observasi, rerata, standar deviasi, nilai minimum, dan nilai maksimum setiap variabel. Statistik deskriptif dari data penelitian ini disajikan dalam Tabel 4. Nilai maksimum dan minimum untuk variabel UMKM adalah 0,2269 dan -0,0563. Selanjutnya, nilai maksimum dan minimum untuk variabel KUR adalah 11,0999 dan 6,0479, serta 0,1880 dan -0,0627 untuk variabel UMKM Komersial. Selain itu, Tabel 4 juga menggambarkan statistik deskriptif untuk variabel kontrol. Variabel pertumbuhan PDRB dengan rerata 0,0739 dan INT dengan rerata 0,0788 untuk periode 2015 s.d. 2022.

Tabel 4 Analisis Statistik Deskriptif 6 Provinsi tahun 2015 s.d. 2022

| Variabel | n  | Mean   | Std. Dev | Min     | Max     |
|----------|----|--------|----------|---------|---------|
| UMKM     | 48 | 0,0771 | 0,0547   | -0,0563 | 0,2269  |
| KUR      | 48 | 8,9436 | 1,2854   | 6,0479  | 11,0999 |
| UMKMKOM  | 48 | 0,0578 | 0,0503   | -0,0627 | 0,1880  |
| PDRBG    | 48 | 0,0739 | 0,0405   | -0,0536 | 0,1287  |
| INT      | 48 | 0,0788 | 0,1920   | 0,06    | 0,12    |

Keterangan: **UMKM** = Pertumbuhan Total Kredit UMKM; **KUR** = Penyaluran KUR per Provinsi; **UMKMKOM** = Pertumbuhan Kredit UMKM Komersial; **PDRBG** = Pertumbuhan Pendapatan Domestik Bruto; **INT** = Tingkat Suku Bunga

Sumber: Diolah Penulis (2024)

Selanjutnya, hasil dari STATA menunjukkan bahwa tidak ada korelasi yang sangat kuat antar variabel yang diuji, sebagaimana tertulis pada Tabel 5. Korelasi antara KUR dan UMKM adalah tidak signifikan. Lebih lanjut, UMKM Komersial secara positif signifikan berkorelasi dengan UMKM dengan level 5%. Selain itu, variabel kontrol Pertumbuhan PDRB secara positif berkorelasi dengan UMKM. Pada sisi lain, tingkat suku bunga tidak berkorelasi dengan UMKM.

Tabel 5 Hasil Uji Korelasi

|         | UMKM   | KUR     | UMKMKOM | PDRBG  | INT   |
|---------|--------|---------|---------|--------|-------|
| UMKM    | 1,000  |         |         |        |       |
| KUR     | -0,242 | 1,000   |         |        |       |
| UMKMKOM | 0,824* | -0,391* | 1,000   |        |       |
| PDRBG   | 0,532* | -0,215  | 0,635*  | 1,000  |       |
| INT     | 0,057  | -0,619* | 0,262   | 0,300* | 1,000 |

Keterangan: **UMKM** = Pertumbuhan Total Kredit UMKM; **KUR** = Penyaluran KUR per Provinsi; **UMKMKOM** = Pertumbuhan Kredit UMKM Komersial; **PDRBG** = Pertumbuhan Pendapatan Domestik Bruto; **INT** = Tingkat Suku Bunga; \* Mengindikasikan tingkat signifikansi korelasi pada level 5%.

Sumber: Diolah Penulis (2024)

Pada data yang bersifat panel, kombinasi antara *cross section* dan *time series*, terdapat tiga pilihan metode yang dapat digunakan dalam

melakukan analisis data sebagaimana disebutkan pada bagian sebelumnya. Pengujian dan pemilihan model estimasi data panel merupakan prosedur yang digunakan untuk memilih satu dari tiga model yang lebih sesuai dan memiliki pendugaan yang lebih efisien. Terdapat beberapa cara yang dapat digunakan untuk menentukan model mana yang paling tepat dalam mengestimasi parameter data panel. Pengujian yang dilakukan yaitu Uji Chow, Uji Hausman, dan Uji Lagrange Multiplier. Berdasarkan hasil pengujian, peneliti memperoleh simpulan *Random Effect Model* (REM).

Selanjutnya, pengujian asumsi klasik dilakukan dalam rangka menghasilkan parameter yang bersifat Best Linear Unbiased Estimator (BLUE) dengan artian estimator yang dimiliki memiliki nilai harapan sesuai dengan nilai yang sesungguhnya.

##### 1. Uji Multikolinearitas

Pengujian ini dilakukan dengan cara menggunakan nilai Variance Inflation Factor (VIF) yang bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi ditemukan korelasi antar variabel independen/bebas. Variabel independen dapat dikatakan terbebas dari multikolinearitas apabila nilai VIF kurang dari 10 ( $VIF < 10$ ) atau koefisien korelasi pearson bernilai kurang dari 0,8. Setelah dilakukan uji multikolinearitas, hasil penghitungan VIF untuk variabel KUR (Penyaluran KUR) yang menjadi fokus penelitian dan variabel kontrol INT (Tingkat Suku Bunga) memiliki nilai VIF di atas 10, sehingga perlu dilakukan *centering*. Setelah dilakukan *treatment centering*, nilai VIF semua variabel independen kurang dari 10. Dengan demikian, tidak terdapat gejala multikolinearitas atas variabel independen dalam model regresi.

##### 2. Uji Heteroskedastisitas

Pengujian ini sering terjadi pada data cross section, dengan demikian kemungkinan terjadi pada data panel cukup besar. Heteroskedastisitas dapat terjadi apabila nilai residual dari model tidak memiliki varian konstan, setiap observasi mempunyai reliabilitas yang berbeda akibat perubahan kondisi yang tidak terdokumentasikan dalam model. Model regresi yang baik adalah homoskedastisitas, atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Berdasarkan uji heteroskedastisitas, tidak ada masalah heteroskedastisitas pada model yang diuji.

Selanjutnya, setelah melewati rangkaian uji asumsi klasik dengan kesimpulan bahwa tidak ada pelanggaran asumsi klasik, dilakukan analisis regresi. Hasil uji hipotesis pada Tabel 4 menunjukkan bahwa semua model regresi signifikan yang ditandai dengan signifikansi pada F-score kurang dari 1%, sehingga dapat dilakukan interpretasi atas hasil. Selanjutnya, R<sup>2</sup> pada model adalah 70,76%, artinya variabel

independen pada model menjelaskan Pertumbuhan Total Kredit UMKM sebesar 70,76% dari total varian.

#### Hubungan Penyaluran KUR terhadap Pertumbuhan Total Kredit UMKM

Hipotesis pertama pada penelitian ini adalah bagaimana hubungan Penyaluran KUR terhadap Pertumbuhan Total Kredit UMKM. Hasil pengujian dapat dilihat pada Tabel 6, bahwa tidak terdapat pengaruh antara Penyaluran KUR dan Pertumbuhan Total Kredit UMKM di Wilayah Jawa. Hasil tersebut menjelaskan bahwa hipotesis pertama tidak didukung, yang artinya secara total, penyaluran KUR di wilayah Jawa tidak terdapat hubungan pada pertumbuhan kredit UMKM. Hal ini didukung oleh Nisa (2016) yang menganalisis dampak kebijakan yang mewajibkan bank untuk mengalokasikan minimal 20% kreditnya untuk UMKM. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kebijakan tersebut belum meningkatkan alokasi kredit UMKM secara signifikan seperti yang diharapkan pemerintah. Hasil penelitian lainnya menunjukkan bahwa UMKM sering menghadapi kesulitan dalam memperoleh kredit dari lembaga formal. Begitu pula dengan bank yang mengalami kesulitan dalam memberikan kredit kepada sektor ini. Hal ini disebabkan karena banyak faktor yang memengaruhi penyaluran kredit kepada UMKM, seperti persaingan antar bank, kerangka hukum, kebijakan kredit, dan kurangnya informasi tentang peminjam UMKM (Choudhury & Goswami, 2017, 2019). Nayak (2017) menjelaskan bahwa ukuran bank dan kinerja bank memiliki hubungan negatif dengan proporsi kredit yang diberikan kepada sektor UMKM karena bank yang lebih besar dan berkinerja lebih baik cenderung kurang tertarik untuk memberikan kredit kepada UMKM.

Tjahjono (2023) menjelaskan bahwa UMKM masih mengalami banyak kendala untuk mengakses KUR. Hal ini salah satunya disebabkan adanya anjuran supaya tidak boleh ada penyaluran sebelum 27 Januari 2023 dimana Permenkop Nomor 1 Tahun 2023 baru terbit tanggal 27 Januari 2023. Selain itu, adanya perubahan suku bunga KUR berjenjang menyebabkan perubahan pada sistem perbankan dan SIKP sehingga penyalur mengalami keterlambatan dalam penyaluran KUR. Pelaku UMKM merasa dipersulit dalam mengajukan KUR dibandingkan dengan peminjam kredit komersil. Selanjutnya, Tjahjono (2023) menyajikan data hasil aduan masyarakat terkait KUR bagi UMKM adalah adanya permintaan agunan sebanyak 53%, tidak ada kepastian atas tindak lanjut permohonan KUR sebesar 37%, dan masyarakat merasa dipersulit dalam pengajuan KUR sebesar 10%.

Selain itu, variabel kontrol pada penelitian ini mendapatkan hasil bahwa Pertumbuhan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRBG) dan Tingkat Suku Bunga (INT) memiliki hasil tidak signifikan dan negatif signifikan. PDRBG memiliki hasil tidak signifikan yang menunjukkan bahwa apabila PDRB pada wilayah Jawa tumbuh maka tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan kredit UMKM. Shofia et al. (2023)

menjelaskan bahwa secara simultan, jumlah UMKM, angkatan kerja, dan inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap laju PDRB. Selain itu, tingkat suku bunga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan UMKM. Hal ini sejalan dengan penelitian dari Goel et al. (2021) yang menyatakan bahwa prosedur awal, jangka waktu penyambungan listrik, suku bunga pinjaman, dan pajak perusahaan memberikan pengaruh negatif terhadap jumlah UMKM. Gultom et al. (2024) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa suku bunga kredit memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat penyaluran kredit di Provinsi Sumatera Utara yang berarti bahwa ketika suku bunga kredit naik, tingkat penyaluran kredit cenderung menurun. Hal ini didukung penelitian dari Arsyad & Haeruddin (2022).

#### Hubungan Pertumbuhan Kredit UMKM Komersial terhadap Pertumbuhan Total Kredit UMKM

Selanjutnya, hipotesis kedua, diperoleh hasil bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan pada tingkat 10% antara Pertumbuhan Kredit UMKM Komersial (UMKMKOM) dengan Pertumbuhan Total Kredit UMKM (UMKM), sehingga, H2 didukung. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan kredit UMKM komersial merupakan salah satu faktor dalam peningkatan pertumbuhan kredit UMKM di wilayah Jawa. Hasil ini sesuai dengan yang disajikan pada Tabel 6.

Tabel 6 Hubungan Penyaluran KUR dan Pertumbuhan Kredit UMKM Komersial terhadap Pertumbuhan Total Kredit UMKM

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DV = UMKM             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| INTERCEPT                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,0218<br>(0,028)     |
| KUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -0,0010<br>(0,831)    |
| UMKMKOM                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,9008*<br>(0,000)    |
| PDRBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,0799<br>(0,595)     |
| INT                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -0,5482***<br>(0,084) |
| Prob > F                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,0000                |
| R <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,7076                |
| Keterangan:<br><b>UMKM</b> = Pertumbuhan Total Kredit UMKM; <b>KUR</b> = Penyaluran KUR per Provinsi; <b>UMKMKOM</b> = Pertumbuhan Kredit UMKM Komersial; <b>PDRBG</b> = Pertumbuhan Pendapatan Domestik Bruto; <b>INT</b> = Tingkat Suku Bunga.<br>*, **, dan *** menunjukkan level signifikansi 1, 5, dan 10 % |                       |

Sumber: Diolah Penulis (2024)

Berdasarkan hasil yang diperoleh, dapat menunjukkan bahwa apabila kredit UMKM komersial meningkat maka pertumbuhan total kredit UMKM akan meningkat. Hal ini menyiratkan bahwa arahan Presiden agar proporsi kredit sebesar 30% pada tahun 2024 dapat tercapai, apabila tren pada hasil penelitian ini terus berlanjut. Jalunggono et al. (2020) dalam

penelitiannya menjelaskan bahwa penyaluran kredit UMKM memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi hanya dalam jangka panjang.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris terkait hubungan antara Penyaluran KUR per Provinsi dan Pertumbuhan Kredit UMKM Komersial terhadap Pertumbuhan Total Kredit UMKM pada Pulau Jawa. Hasil pengujian terkait penyaluran KUR terhadap pertumbuhan total kredit UMKM, ditemukan bahwa penyaluran KUR tidak terdapat hubungan dengan pertumbuhan total kredit UMKM di wilayah Jawa. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa besar kecilnya penyaluran KUR di wilayah Jawa, tidak memiliki hubungan dengan pertumbuhan total kredit UMKM. Kredit yang dilakukan oleh UMKM tidak hanya melalui KUR, banyak kredit-kredit lain yang bisa diajukan oleh UMKM seperti Kredit Komersial UMKM, kredit modal kerja, kredit investasi, kredit tanpa agunan, kredit multiguna, mkredit dengan skema syariah, kredit melalui lembaga non-bank, dan kredit-kredit lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa KUR hanya sebagian kecil saja dari jenis kredit yang diajukan UMKM mengingat pinjaman yang diberikan KUR juga terbatas. Selain itu, terdapat banyak kendala bagi pelaku UMKM untuk mengakses pembiayaan KUR seperti bank yang lebih besar dan berkinerja lebih baik cenderung kurang tertarik untuk memberikan kredit kepada UMKM.

Selanjutnya, hasil pengujian terhadap hubungan pertumbuhan kredit UMKM komersial terhadap pertumbuhan total kredit UMKM menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif signifikan antara kredit UMKM komersial dan total kredit UMKM, artinya ketika kredit UMKM komersial di wilayah Jawa meningkat, total kredit UMKM meningkat. Hal ini mengindikasikan bahwa target minimal kredit UMKM 30% pada tahun 2024 akan lebih cepat tercapai apabila Bank Indonesia melakukan perbaikan pada kebijakan penyaluran kredit UMKM secara umum, bukan pada peningkatan penyaluran KUR.

## 6. IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

Hasil penelitian ini memberikan implikasi terkait penyaluran KUR yang dapat memberikan dampak pada pertumbuhan UMKM. Pemerintah harus menyesuaikan subsidi dan insentif kepada penyalur sesuai dengan karakteristik debitur yang ditangani penyalur. Sebagai contoh untuk debitur yang memiliki *cost of fund* tinggi dan karakteristik debitur berisiko tinggi, seperti Perusahaan start-up dan sektor pertanian dan perkebunan, seharusnya mendapatkan subsidi yang lebih besar sehingga memberikan insentif lebih mereka untuk ekspansi mencari debitur baru yang *non-bankable*. Dalam menyalurkan kredit UMKM, penyalur dapat mempertimbangkan tingkat PDRB wilayah agar terjadi pemerataan penyaluran dan pertumbuhan UMKM. Hal ini sesuai dengan arahan

presiden terkait persentase minimal penyaluran kredit UMKM pada 2024 sebesar 30%.

Penelitian ini terdapat keterbatasan dimana peneliti mengalami kendala dalam mengidentifikasi nilai penyaluran KUR yang berulang pada UMKM. Hal ini dikarenakan, penyaluran KUR berulang atau tidak berulang pada suatu UMKM, tetap akan menambah total kredit UMKM, yang secara pertumbuhan tidak berubah. Selain itu, penelitian ini masih menggunakan data penyaluran KUR secara keseluruhan, belum membagi KUR berdasarkan jenisnya, yaitu KUR Super Mikro, KUR Mikro, KUR Kecil, dan KUR Penempatan TKI. Selain itu, tulisan ilmiah yang mendukung penelitian ini masih sangat jarang.

Oleh karena itu, peneliti merekomendasikan untuk penelitian berikutnya dapat menggunakan variabel independen lain yang dapat mempengaruhi variabel dependen, yaitu Pertumbuhan Total Kredit UMKM, misalnya membagi penyaluran KUR berdasarkan jenisnya, seperti KUR Super Mikro, KUR Mikro, KUR Kecil, atau KUR Penempatan TKI sehingga diharapkan dapat memberikan hasil yang komprehensif, apakah KUR secara spesifik berdasarkan jenisnya dapat mempengaruhi pertumbuhan total kredit UMKM. Selain itu, pemilihan objek perlu diperhatikan lebih baik lagi, misalnya penelitian selanjutnya dapat berfokus pada daerah yang menjadi prioritas nasional. Hal ini dilakukan dalam upaya agar mendapatkan hasil yang lebih komprehensif, apakah penentuan prioritas nasional tersebut menjadi pilihan yang tepat atau tidak.

## DAFTAR PUSTAKA (REFERENCES)

- Adju, N. Y., Blongkod, H., & Panigoro, N. (2023). Pengaruh Pemberian Kredit Usaha Rakyat Terhadap Pendapatan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah. *Jurnal Ekonomi*, 28(1). <https://doi.org/10.24912/je.v28i1.1402>
- Alma Meidhita. (2023, October 5). *Perbedaan KUR dan KUM, Mana yang Lebih Cocok untuk Usaha Anda?* <https://radarbanyumas.disway.id/read/83752/perbedaan-kur-dan-kum-mana-yang-lebih-cocok-untuk-usaha-anda>
- Aqida, M. S., & Fitria, S. (2019). Pengaruh Akses Keuangan Terhadap Pertumbuhan UMKM dengan Moderasi Literasi Keuangan di Kota Semarang. *DIPONEGORO JOURNAL OF MANAGEMENT*, 8(2).
- Aribawa, D. (2016). Pengaruh literasi keuangan terhadap kinerja dan keberlangsungan UMKM di Jawa Tengah. *Jurnal Siasat Bisnis*, 20(1), 1–13. <https://doi.org/10.20885/jsb.vol20.iss1.art1>
- Aristanto, E., Hidayatullah, S., Windhyastiti, I., Khourah, U., & Rachmawati, I. K. (2022). Obstacles of Micro and Small Business Access to Kredit Usaha Rakyat (KUR) Program. *MBR (Management and Business Review)*, 6(1), 50–58. <https://doi.org/10.21067/mbr.v6i1.6719>
- Arsyad, M., & Haeruddin, S. H. (2022). Pengaruh Tingkat Suku Bunga, Inflasi, Dan Non Performing Loan Terhadap Pemberian Kredit Dan Dampaknya Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perusahaan

- Perbankan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *YUME : Journal of Management*, 5(3).
- Artini, N. R. (2019). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan UMKM di Kabupaten Tabanan. *GANEC SWARA*, 13(1). <https://doi.org/10.35327/gara.v13i1.64>
- Ati, D. M., Nopitasari, F., Pepi, P., Yunus, F., & Setiawan, A. (2022). PEMBIAYAAN KUR BSI UNTUK PERKEMBANGAN UMKM DI DESA EMBONG IJUK KABUPATEN KEPAHİYANG. *Jurnal Ilmiah Akuntansi, Manajemen Dan Ekonomi Islam (JAM-EKIS)*, 4(2). <https://doi.org/10.36085/jam-ekis.v4i2.3120>
- Barus, A. C., & Lu, M. (2013). Pengaruh Spread Tingkat Suku Bunga dan Rasio Keuangan Terhadap Penyaluran Kredit UMKM pada Bank Umum di Indonesia. In *Jurnal Wira Ekonomi Mikroskil* (Vol. 3).
- Candratrilaksita, W., Purnaweni, H., & Kismartini, K. (2020). Evaluation of the Effectiveness of Kredit Usaha Rakyat (KUR) Policy in Encouraging Economic Growth and Social Welfare in Central Java Province. *JIAP: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Pemerintahan Indonesia*, 1(1). <https://doi.org/10.33830/jiapi.v1i1.1>
- Choudhury, M., & Goswami, C. (2017). MSME Financing Gaps – Research Review 1995-2017. *SEDME (Small Enterprises Development, Management & Extension Journal): A Worldwide Window on MSME Studies*, 44(3). <https://doi.org/10.1177/0970846420170301>
- Choudhury, M., & Goswami, C. (2019). MSME Financing Gaps – Review of Literature for the Period 2005 To 2016. *JOURNAL OF SMALL BUSINESS AND ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT*, 7(2). <https://doi.org/10.15640/jsbed.v7n2a5>
- Darnis, F., & Azdy, R. A. (2019). Pemanfaatan Media Informasi Website Promosi (e-Commerce) sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan UMKM Desa Pedado. *Seminar Nasional Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat, Juli*.
- Elliyana, E., Ambo Paerah, & Musdayanti. (2020). Kredit Usaha Rakyat Bank Rakyat Indonesia Dan Peningkatan Pendapatan UMKM. *Jurnal Administrasi Kantor*, 8(2).
- Faisal, S., & Sejati, H. (2023). Contribution Of Banking Finance To The Development Of Micro, Small, And Medium Enterprises. *Journal Research of Social Science, Economics, and Management*, 2(10). <https://doi.org/10.59141/jrssem.v2i10.483>
- Goel, L., Kareena, Priya, & Verma, S. (2021). Factors Affecting Number of MSMEs in Different Countries. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3905273>
- Gultom, R. H., Angkat, F., & Sinurat, N. A. (2024). Pengaruh Suku Bunga Kredit dan Non-Performing Loan Terhadap Tingkat Penyaluran Kredit di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2022. *JALAKOTEK: Journal of Accounting Law Communication and Technology*, 1(2).
- Hamdani, H., & Farmiati, J. (2021). Analisis Serapan Kredit Investasi UMKM di Aceh. *Jurnal EMT KITA*, 5(2). <https://doi.org/10.35870/emt.v5i2.470>
- Haqiqi, F., Susanti, R. D., & Ferawati. (2020). Analisis Pengaruh Pemberian Modal Kerja dan Biaya Produksi Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Kecil Menengah di Desa Pongkar Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun (Tahun 2014 – 2018). *JURNAL CAFETARIA*, 1(1). <https://doi.org/10.51742/akuntansi.v1i1.54>
- Hervé, A., Schmitt, C., & Baldegger, R. (2020). Digitalization, entrepreneurial orientation and internationalization of micro-, small- And medium-sized enterprises. *Technology Innovation Management Review*, 10(4). <https://doi.org/10.22215/TIMREVIEW/1343>
- Hutabarat, B. A., Sartika, D., & Nofranita, W. (2023). Pengaruh Kredit Usah Rakyat (KUR) Terhadap Profitabilitas UMKM di Kota Palembang. *Jurnal Menara Ekonomi : Penelitian Dan Kajian Ilmiah Bidang Ekonomi*, 9(1). <https://doi.org/10.31869/me.v9i1.4774>
- Jalunggono, G., Cahyani, Y. T., & Juliprijanto, W. (2020). PENGARUH EKSPOR, IMPOR DAN KURS TERHADAP CADANGAN DEvisa INDONESIA PERIODE TAHUN 2004 – 2018. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Akuntansi*, 22(2). <https://doi.org/10.32424/jeba.v22i2.1593>
- Kadin. (2024). *UMKM Indonesia*. <https://kadin.id/data-dan-statistik/umkm-indonesia/>
- Latifah, F., & Lubis, R. (2020). *Digitalization of ZISWAF Development in Indonesia*. <https://doi.org/10.4108/eai.21-9-2019.2293962>
- Lisnawati. (2023). *Tantangan UMKM di Tahun 2024*.
- Mokalu, O. Y., Montolalu, J., & Keles, D. (2018). Pemanfaatan Fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) Terhadap Peningkatan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) (Studi Kasus Bank Mandiri Kantor Kas Manado Paal Dua). *Jurnal Administrasi Bisnis*, 6(1).
- Nayak, M. (2017). The impact of commercial bank's characteristics on micro, small, and medium enterprises in India. *Economic Journal of Emerging Markets*, 9(1).
- Ningsih, T. W., Tulasi, D., & Masela, M. Y. (2023). Investigasi Qualitative : Menggali Tantangan yang Dihadapi UKM Indonesia dalam Mengakses Layanan Keuangan. *Sanskara Akuntansi Dan Keuangan*, 01(03), 120–130. <https://doi.org/10.58812/sak.v1.i03>
- Nisa, C. (2016). Analisis Dampak Kebijakan Penyaluran Kredit kepada UMKM Terhadap Pertumbuhan Pembiayaan UMKM Oleh Perbankan. *DeReMa*, 11(2).
- Octavia, A., Indrawijaya, S., Sriayudha, Y., Heriberta, Hasbullah, H., & Asrini. (2020). Impact on e-commerce adoption on entrepreneurial orientation and market orientation in business performance of smes. *Asian Economic and Financial Review*, 10(5), 516–525.

- <https://doi.org/10.18488/journal.aefr.2020.105.516.525>
- Prabowo, H., Herwiyanti, E., Pratiwi, U., Ekonomi, F., & Bisnis, D. (2020). Pengaruh Literasi Keuangan, Tingkat Suku Bunga, Kualitas Pelayanan dan Jaminan terhadap Pengambilan Kredit Perbankan oleh UKM. *Jurnal Akuntansi & Perpajakan*, 2(1).
- Prakoso, A. (2020). Pengaruh Literasi Keuangan terhadap Kinerja UMKM se-Eks Karesidenan Besuki. In *Valid Jurnal Ilmiah* (Vol. 17, Issue 2).
- Purbodjati, A., Hakim, D. B., Siregar, H., & Sembel, R. (2022). Determinants of Credit Growth For MSME Financing in Bank DKI in Jakarta Province. *Jurnal Aplikasi Bisnis Dan Manajemen*. <https://doi.org/10.17358/jabm.8.1.46>
- Purnama, L., Harahap, R. H., & Nasution, B. (2022). Peran Lembaga Perbankan Dalam Pemberdayaan Perempuan. *GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal Dan Pembangunan*, 7(1). <https://doi.org/10.56015/governance.v7i1.37>
- Purnaningrum, E., Dwiarta, I. M. B., Aripriatno, T., Waryanto, R. B. D., & Prasetyo, A. (2021). Pemberdayaan UMKM Disabilitas Trenggalek untuk Peningkatan Pendapatan Pasca Pandemi melalui Upgrading Sosial Media. *Ekobis Abdimas : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2). <https://doi.org/10.36456/ekobisabdimas.2.2.4858>
- Putri, N. K. (2022). Analisis Utilitas Produk Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Dalam Meningkatkan Produktifitas dan Pendapatan Nasabah UMKM di Bank Syariah Indonesia KC Surabaya Dharmawangsa (Studi Kasus BSI KUR Mikro). *Journal of Economic and Bussiness Islamic*, 8.5.2017.
- Riffianto, A. S., & Suryani, T. (2016). *Kapabilitas keuangan usaha kecil dan menengah penghasil produk unggulan*. 6, 15–26. <https://doi.org/10.14414/jbb.v6i1.722>
- Rohani, S. (2018). Analisis Potensi UMKM Tahu Dan Tempe Terhadap Peningkatan Pendapatan Keluarga Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Bapak Marzuki Di Desa Pekalongan). In *UIN Raden Intan Lampung* (Vol. 7).
- Sanistasya, P. A., Rahardjo, K., & Iqbal, M. (2018). Pengaruh Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan Terhadap Kinerja Usaha Kecil di Kalimantan Timur. In *Jurnal Economia* (Vol. 14, Issue 1). <https://journal.uny.ac.id/index.php/economia>
- Santoso, B. (2020). *The Role of Micro, Small, and Medium Enterprises Toward Sustainable Development Goals Through Islamic Financial Institutions*.
- Shofia, A., Triha, H., Putri, R. M., Alius, M., & Satria, T. F. (2023). Pengaruh Jumlah Angkatan Kerja, Jumlah UMKM, dan Inflasi Terhadap Laju PDRB Kota Padang. *Jurnal Surya Teknika*, 10(2). <https://doi.org/10.37859/jst.v10i2.6378>
- Somadi, S. (2020). Evaluasi Keterlambatan Pengiriman Barang dengan Menggunakan Metode Six Sigma. *Jurnal Logistik Indonesia*, 4(2). <https://doi.org/10.31334/logistik.v4i2.1110>
- Suryani, I., & Rita, M. R. (2023). Pengaruh Program KUR dan BLT terhadap Kinerja UMKM dengan Strategi Diferensiasi sebagai Variabel Mediasi. *Jurnal Manajemen Dan Keuangan*, 12(1). <https://doi.org/10.33059/jmk.v12i1.5310>
- Syahrir, I., Nurhidayat, R., & Mutaqin. (2016). Kredit Usaha Rakyat (KUR): “Indonesian Way” Untuk Mensejahterakan Rakyat Indonesia. *Kajian Ekonomi Keuangan- Badan Kebijakan Fiskal*.
- Syam, M., & Musfira, R. (2021). Pengaruh Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) PT Bank Rakyat Indonesia,Tbk (Persero) Unit Palakka Terhadap Peningkatan Pendapatan Ekonomi Usaha Mikro Kecil (UMK) di Kota Watampone. *Islamic Banking and Finance*, 1(1). <https://doi.org/10.30863/ibf.v1i1.3014>
- Teruna, D., & Ardiansyah, T. (2024). Analisis Trend Posisi Kredit UMKM pada Bank Umum untuk Skala Menengah di Indonesia. *Jurnal Usaha*, Vol. 5, No. 1, 107–123.
- Tjahjono, H. (2023, October 2). *UMKM Masih Hadapi Kendala Akses KUR, Ombudsman RI Berikan Masukan*. <https://ombudsman.go.id/news/r/-umkm-masih-hadapi-kendala-akses-kur-ombudsman-ri-berikan-masukan>
- Wahyudiati, D., & Isroah. (2018). Pengaruh Aspek Keuangan dan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Terhadap Kinerja Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Desa Kasongan. *Jurnal Profita: Kajian Ilmu Akuntansi*, 6(2).
- Waryanto, H. (2020). The Influence of Working Capital and KUR Credit Provision on UMKM Income Level at PT. Bank Rakyat Indonesia Branch of Bintaro. *PINISI Discretion Review*, 1(1). <https://doi.org/10.26858/pdr.v1i1.13406>